

KEBIJAKAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL KOTA SIGLI

SYUKRI ⁽¹⁾, ANWAR ⁽²⁾

¹Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur

² Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur Sigli Aceh

e-mail: syukri@unigha.ac.id , anwar@unigha.ac.id

ABSTRACT

Indonesian society which is dominated by people who with low education and lack of capital, make the choice for not much economic activity. For those who have entered working age, one type of work that can be done is to work or create jobs in the small business sector besides not requiring a lot of capital. Indonesia is very big. The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) turned out to be constrained by several things, including problems with capital. This is where Baitul Mal, Pidie Regency, with its economic empowerment program is expected to be an ideal solution for empowering small businesses, especially small traders in Pidie Regency. Therefore, this study wants to examine how the form of economic empowerment policy carried out by Baitul Mal in Pidie Regency is for small traders in Pidie Regency. The methodology used in this research is qualitative research. The process of this research is field research. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that Baitul Mal of Pidie Regency in distributing business capital assistance to small traders in Pidie Regency in the form of productive infaq into two forms of assistance, namely: cash assistance, in-kind assistance. As for the impact of economic empowerment from productive infaq that has been given by Baitul Mal, Pidie Regency to small traders, although it can help a little in developing their business. However, the little trader was not yet fully empowered.

Keywords: Policy, Empowerment, Economy

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang dengan pendidikan rendah dan kurangnya modal, membuat pilihan untuk tidak banyak kegiatan ekonomi. Bagi yang sudah memasuki usia kerja, salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja atau menciptakan lapangan kerja di sektor usaha kecil selain tidak membutuhkan modal yang banyak. Indonesia sangat besar. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ternyata terkendala beberapa hal, termasuk masalah permodalan. Di sinilah Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan program pemberdayaan ekonominya diharapkan menjadi solusi ideal bagi pemberdayaan usaha kecil khususnya pedagang kecil di kabupaten pidie. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana bentuk kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baitul Mal di Kabupaten Pidie bagi para pedagang kecil di Kabupaten Pidie. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil di Kabupaten Pidie berupa infaq produktif menjadi dua bentuk bantuan yaitu: bantuan tunai, bantuan natura. Adapun dampak pemberdayaan ekonomi dari infaq produktif yang telah diberikan

Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada pedang-pedang kecil, meskipun dapat sedikit membantu dalam pengembangan usaha mereka. Namun, pedang kecil itu belum sepenuhnya diberdayakan.

Kata kunci: Kebijakan, pemberdayaan, ekonomi

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini. selalu diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. khususnya kelas menengah ke bawah, yaitu konsep ekonomi kerakyatan, yang merupakan gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama memperbaiki nasib masyarakat pada umumnya yang tinggal di pedesaan.

Konsep ini membawa perubahan penting menuju kemajuan, terutama menuju meruntuhkan ikatan dan sekat-sekat yang menahan sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Salah satu implikasi dari konsep ekonomi kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha kecil seperti pedagang kecil. Di negara berkembang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, pedagang kecil merupakan salah satu pelaku ekonomi terbesar. Selain itu, pedagang kecil juga memiliki peran strategis dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di akar rumput yang sulit masuk ke sektor formal dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. berperan dalam mewujudkan stabilitas

ekonomi nasional secara umum. dan stabilitasekonomi khususnya.

Dalam upaya membangun perekonomian nasional subsektor industri mikro, pedagang kecil dan menengah yang dalam istilah sering disebut dengan UMKM atau usaha kecil harus mendapatkan prioritas utama untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian. perekonomian nasional. Sektor industri, baik skala besar maupun skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. selalu berkembang sesuai karakter dan masalahnya dihadapi.

Mengingat besarnya potensi usaha kecil yang ia tunjukkan dari tahun ke tahun. Sehingga, pemberdayaan pedagang kecil menjadi lebih strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. dalam perkembangannya pedagang kecil masih memiliki berbagai permasalahan, permasalahan pedagang kecil saat ini sangat berat karena persaingan yang ketat terutama dengan masuknya produk luar negeri. Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku usaha utama. Secara konseptual, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum miskin dan tidak bisa lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan.

Kehadiran Baitul Mal di Kabupaten Pidie di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi perantara bagi para pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha, pertumbuhan Baitul Mal dari tahun ke tahun terus berkembang lebih baik, pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan Baitul Mal mampu

menjalankan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan sistem syariah dimana masyarakat masih awam dengan adanya sistem syariah. Selain itu, Baitul Mal memberikan kemudahan bagi para pedagang dengan akses pembiayaan yang minim. Selain itu, proses pembiayaan juga tidak memiliki persyaratan yang rumit dan birokrasi baik, sehingga tidak membebani pedagang kecil untuk meminjam dan mengembalikan uang pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha. Disisi lain tentunya juga terdapat kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam menjalankan program pemberdayaan ekonominya

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pemberdayaan ekonomi pedagang kecil di kabupaten pidie.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Baitul mal kabupaten pidie dalam pemerdayaan pedagang kecil?
2. Dampak terhadap strategi Baitul mal dam pemberdayaan tersebut?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Baitul mal kabupaten pidie dalam pemerdayaan pedagang kecil
2. Untuk mengetahui dampak terhadap strategi Baitul mal dam pemberdayaan tersebut

Tinjaun Pustaka

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan

dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sector publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Konsep kebijakan publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang

pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebijakan publik atau populernya sering disebut sebagai kebijakan pemerintahan, merupakan hal yang umum dijumpai sebagaimana yang telah disadari kebijakan adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peters dalam Hamdi (2014: 35) munculnya kebutuhan untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik dibuat dan diubah-ubah, dan bagaimana nilai efektivitas dan moralitas suatu kebijakan. Luasnya lingkup pengaruh kebijakan pemerintah tersebut sebetulnya menumbuhkan kebutuhan untuk memahami makna kebijakan pemerintah.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Kemudian Sugiyono (2010: 11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis bertempat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Observasi

2. Wawancara
3. Studi dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

Strategi Baitul mal kabupaten pidie dalam pemerdayaan pedagang kecil?

Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah lembaga pengelola harta benda keagamaan badan hukum yang disertai tugas mengelola infaq, zakat, wakaf dan lain-lain. Sehingga fungsi dan tujuan pengelolaan harta benda keagamaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Syariat akan diwujudkan semaksimal mungkin. Secara umum Tanggung jawab Baitul Mal sebagai lembaga amil adalah mengurus, mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, memanfaatkan, memantau, dan menentukan penerima. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah pemberian infaq produktif berupa modal usaha yang sering disebut sebagai pemberdayaan produktif untuk disalurkan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Baitul Mal Kabupaten Pidie bahwa: salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah pemberian infaq produktif berupa modal usaha yang sering disebut dengan pemberdayaan produktif untuk disalurkan ke dalam kegiatan ekonomi Publik. Menurut Andi Mulia, Amd. Kom untuk penyaluran infaq produktif ini dalam bentuk bantuan modal (dalam bentuk uang atau barang).

Bantuan ini berupa uang tunai yang bersumber dari infaq produktif yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada pedagang kecil. Akad yang digunakan dalam pembagian ini adalah akad qardl al-hasan yaitu bantuan pinjaman baik hati tidak berguna dan penerima hanya kembali modal saja. Dengan cara ini para pedagang kecil di kabupaten pidie memiliki semacam usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga setelah beberapa tahun

diharapkan mereka akan berhasil dan mandiri.

Pemberian infaq produktif ditujukan kepada para pedagang kecil agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan modal usaha pihak lain. Selain itu Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memiliki:

Sasaran untuk mengubah penerima bantuan modal menjadi berkembang dan mandiri. Sistem dan mekanisme yang digunakan adalah dana bergulir. Dan sasarannya adalah individu dan kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Surat keterangan miskin dari kepala desa
- c. Surat keterangan usaha dari kepala desa
- d. Foto copy KTP
- e. Foto tempat usaha
- f. Pas foto 2 lembar

Adapun Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memberikan bantuan dalam bentuk barang yang berupa:kebutuhan usaha, Kontrak yang digunakan dalam distribusi ini adalah: aqad al-ijarah vomitiyah bit tamlik (sistem sewa-beli), yaitu Baitul Mal Kabupaten Pidie menyerahkan becak dengan ketentuan modal yang dikeluarkan Baitul Pidie Regency Mall dicicil dalam waktu dua atau tiga tahun, kemudian diakhiri dengan penyerahan becak kepada penerima sebagai hak milik. Selama cicilan belum lunas, barang masih milik Baitul Mal Kabupaten Pidie yang harus dijaga dan dipelihara oleh penerima, setelah melunasi barang tersebut menjadi milik penerima sepenuhnya.

Memperoleh modal usaha produktif berupa bantuan berupa: barang berupa becak harus dari keluarga miskin-miskin sesuai dengan hasil keterangan dari kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Surat keterangan miskin dari kepala desa
- c. Surat keterangan usaha dari kepala desa

- d. Foto copy KTP
- e. Foto tempat usaha
- f. Pas foto 2 lembar

Jenis becak yang disediakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah becak barang dan becak penumpang, adapun modal yang dikeluarkan dalam pengadaan becak produktif meliputi pengadaan kendaraan bermotor roda dua, pengadaan rumah becak dan pengadaan jaket. Penerima bantuan becak produktif berkewajiban mengembalikan dana pinjaman modal usaha secara angsuran setiap bulan dan dalam masa 30 bulan (dua tahun enam bulan).

Dampak terhadap strategi Baitul mal dan pemberdayaan tersebut

Setelah penulis meneliti dan mengamati benar adanya penerima bantuan yang di berikan Baitul mal yang berbentuk bantuan infaq produktif, penulis mendapatkan Sembilan orang dari penerima bantuan modal usaha, antara lain sebagai pedagang kios, satu orang sebagai penjual ban. Dari enam penerima bantuan infaq produktif ini ada dua orang yang telah mengubah jumlah barang dagangan mereka dari sebelumnya kelangkaan barang kini meningkat.

Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa, bantuan yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Pidie belum mencukupi kebutuhan usahanya, seperti pedagang kios membutuhkan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000-20.000.000, ditambah membayar sewa tempat usaha. Jadi, tolong dana produktif berupa dana hibah, tidak mencukupi untuk memberdayakan bisnis mereka. Selain itu, bantuan produktif pedagang kecil, penulis menemukan bahwa beberapa pedagang kecil ini masih melakukan pinjaman dari kreditur.

Berbeda halnya dengan pedagang tambal ban, mereka tidak membutuhkan modal usaha yang besar dalam menjalankan kegiatannya hampir sama dengan pedagang kios, meskipun hanya memiliki kios, bisnis mereka sudah terlihat tumbuh dengan

menunjukkan peningkatan barang dagangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Bantuan produktif sebesar Rp. 5.000.000,- memang dibenarkan oleh kepala unit pengelola infaq produktif diberikan kepada pedagang kecil.

Meskipun bantuan ini tidak cukup, tapi ini adalah bantuan awal untuk memberi semangat dan motivasi demi kemajuan usaha dalam menggerakkan perekonomian masyarakat lemah. Selain itu, bantuan usaha sebesar Rp. 5.000.000, yang telah yang diberikan adalah ukuran dana infaq produktif yang sangat wajar yang dialokasikan hanya sekitar Rp. 50.000.000-100.000.000/tahun,

Adapun bantuan produktif lainnya adalah usaha rumahan seperti kue donat yang dititipkan di 5 kedai kopi di sekitar pasar Sigli, setiap warung, Sama halnya dengan seorang penjual lontong seorang ibu rumah tangga warga Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli. Dia menjalankan pekerjaan sebagai pengusaha nasi gurih dan lontong Ia menerima bantuan produktif dan juga ada masyarakat lain yang menerima bantuan seperti pedagang sayuran, dan juga sebagai jasa kurir pengiriman barang berubah menjadi penjual kelapa muda, es buah, sop buah, ice teller, bakso, mie ayam dan nasi goreng, menggunakan becak.

Adapun bantuan konsumtif yang diberikan kepada penyandang disabilitas, pasien rujukan, penitipan intensif, perbaikan rumah, khitanan massal dan beasiswa bagi siswa yang tinggal di pesantren. Dari penelitian yang mendapatkan bantuan konsumtif, secara umum penulis menyimpulkan bahwa bantuan yang telah mengingat Baitul Mal Kabupaten Pidie belum mencukupi. Namun, dengan bantuan ini telah banyak membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai penerima manfaatnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian dana bantuan Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak ada pengaruhnya selain pengeluaran uang yang sudah ada, itupun tidak cukup dengan nominal yang

diberikan, pemberian dana bantuan dari Baitul Mal Kabupaten Pidie berdampak pada kesejahteraan mereka, meskipun menerima sedikit.

Penberian, dana dari Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk fakir miskin sangat banyak membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan dana bantuan yang telah diberikan tentunya orang yang mendapatkan bantuan tersebut akan merasa dihargai dan dihargai dalam masyarakat meskipun mereka miskin atau miskin.

Namun dengan bantuan yang telah diberikan tentunya semua orang akan gunakan tergantung kebutuhan sehari-hari, plus Jumlah anggota keluarga banyak tentunya kebutuhan dana sudah pasti yang diterima akan cepat habis, informan terakhir juga memberikan saran kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie menjadi muzakki sangat kecil kemungkinannya jika masyarakat miskin konsumtif menjadikan dana bantuan sebagai kebutuhan konsumtif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bantul mal kabupaten pidie telah memberikan banuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
2. Pemberian dana bantuan ini sebagai pemicu usahanya untuk berkembang, sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memburuhkan.
3. Perlunya keterbukaan informasi kepada masyarakat luas tentang bantuan yang diberikan agar masyarakat mengetahuinya.

Saran

1. Perlunya keseriusan pemerintah kabupaten pidie dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk usaha yang dijalankan agar mendapatkan modal.
2. Baitul mal kabupaten pidie memberikan informasi kapada masyarakat elalui kepala desa agar masyarakat mengetahui

semua informasi tentang bantuan dari Baitul mal

3. Perlunya pendataan yang ekstra terhadap pedagang kecil agar mendapatkan bantuan secara bergeliran.

Daftar pustaka

Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM

Grahatama, Undang-Undang Dasar 1945, (Amandemen), cet 1, Yogyakarta: Pustaka Grhatama,

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013.

Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung: Citapustaka, 2006.

Dokumen Tentang Kriteria Penerima Bantuan Modal Usaha di Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2016

Alim Sumarno. 2012. Penelitian Kausalitas Komparatif. Surabaya: elearningunesa. Arief S. Sadiman, dkk.

David dan Fred R. Manajemen Strategi: konsep-konsep. Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia, 2006

Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.

Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(3), 2458-2464.